

## ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN KANTOR IMIGRASI TANJUNG BALAI ASAHAN BERDASARKAN KONSEP *VALUE FOR MONEY*

**Seftia Rendiani Sitorus<sup>1</sup>, Saparuddin Siregar<sup>2</sup>**  
[srendianis@gmail.com](mailto:srendianis@gmail.com), [saparuddin.siregar@uinsu.ac.id](mailto:saparuddin.siregar@uinsu.ac.id)  
**Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

### ABSTRACT

*To assess the responsibilities of the Tanjung Balai Asahan Immigration Office, measuring financial performance is crucial. The aim of this research is to evaluate the concept of value for money, especially economics, efficiency, and effectiveness to find out how well the Tanjung Balai Asahan Immigration Office is performing. Evaluation of the Tanjung Balai Asahan Immigration Office uses a descriptive qualitative research method of case study analysis. By reviewing information on immigration developments at Tanjung Balai Asahan in 2019–2020, this research is descriptive in nature. The results of the study show that the performance of the Immigration Office: 1) economically with an average economic ratio below 100%; 2) effective with an average ratio of effectiveness below 100%; and 3) efficient with an average effectiveness ratio above 100%. Because it is so economical, efficient and successful, good governance at the immigration office can be achieved if it is evaluated based on calculations using the idea of value for money.*

**Keywords:** *Measurement, financial performance, value for money.*

### PENDAHULUAN

Masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi, termasuk laporan keuangan pemerintah, melalui internet berkat perkembangan terkini di era digitalisasi. Beberapa lapisan masyarakat menjadi lebih berpengetahuan dan kritis terhadap implementasi akibat permasalahan ini, dan masyarakat serta administrasi pemerintahan kini berada di bawah tekanan untuk bersikap transparan dan akuntabel. Melalui penerapan pendekatan anggaran berbasis kinerja, seluruh jajaran pemerintahan, diharapkan dapat mencapai kinerja fiskal yang sehat. Negara-negara yang sudah terlembaga diharapkan mampu menghilangkan permasalahan pemborosan, mengidentifikasi sumber-sumber kebocoran keuangan, dan mengidentifikasi inisiatif-inisiatif yang tidak tepat melalui implementasi yang efisien, yang dapat dimulai pada tingkat nasional.

Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat pelayanan publik terkesan jauh dari kata profesional dan lambatnya masyarakat dalam mendapatkan layanan, namun tetap menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memperbaiki birokrasi negara. Oleh karena itu, selain kinerja

keuangan yang transparan, tata kelola yang baik juga diperlukan. Konsep pendekatan *good governance* yang berfokus terhadap pertumbuhan sektor publik disebut “pemerintahan yang baik”. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan sangatlah penting (Mardiasmo, 2009). *Value for money* juga dikenal dengan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, yang biasa digunakan dalam mengukur kinerja pemerintah dengan menggunakan penganggaran berbasis kinerja (Khikmah, 2014). Memperoleh masukan terbaik dalam jumlah yang dibutuhkan dan dengan biaya serendah mungkin termasuk dalam konteks ekonomi. Efektivitas diukur dengan tingkat pencapaian tujuan program dan memaksimalkan output dari serangkaian input tertentu. Dalam hal ini, masyarakat ingin mencapai akuntabilitas penerapan *Value for Money*, khususnya melalui alokasi dan pengadaan sumber daya yang ekonomis (cermat), efisiensi (*powerful use*) sumber daya dengan cara yang meminimalkan penggunaannya dan memaksimalkan hasil, serta cara yang efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Selain tiga komponen utama *value for the money*, ada yang menyatakan bahwa keadilan (*equity*) dan kesetaraan merupakan dua komponen tambahan yang harus disertakan (Mardiasmo, 2009).

Di sisi lain, penetapan zona integritas menuju WBK atau WBBM juga harus menjadi prioritas pemerintah dan lembaga nasional. WBK atau WBBM berupaya untuk menumbuhkan kesejahteraan pelayanan publik serta budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, efektif, dan berkualitas.

## TINJAUAN TEORETIS

### Akuntansi Pemerintahan

Anggaran sektor keuangan negara, pelaksanaan dan pelaporannya, serta dampak yang ditimbulkannya, semuanya tercakup dalam akuntansi pemerintahan (Sujarweni, 2015). Masalah akuntansi pemerintah dan laporan transaksi bisnis nirlaba dari badan pemerintah dan organisasi nirlaba lainnya adalah bidang keahlian mereka. Selain membantu manajemen melakukan pemantauan pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan, akuntansi pemerintahan berfungsi untuk memberikan laporan akuntansi yang berharga mengenai berbagai bagian pengelolaan administrasi pemerintahan (Sadeli, 2015).

Beberapa tujuan dari penerapan akuntansi pemerintahan, yaitu:

1. *Accountability & stewardship*  
Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi keuangan yang lengkap secara akurat dan tepat waktu kepada penanggung jawab penyelenggaraan instansi pemerintah dalam format dan waktu yang tepat. Demi tanggung jawab tersebut, setiap individu secara tegas atau badan pengelola keuangan negara harus memberikan tanggung jawab atau perhitungan.
2. Manajerial  
Menyediakan data keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, serta evaluasi kinerja pemerintah.
3. Pengawasan  
Tujuannya agar akuntansi pemerintahan mampu menjalani pemeriksaan secara rutin, efektif, dan efisien oleh pejabat pengawasan fungsional.

### Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan diartikan sebagai temuan atau pengukuran proyek penelitian yang dilakukan

untuk memastikan sejauh mana suatu organisasi tertentu telah menjalankan operasinya sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan dengan baik dan benar (Fahmi, 2012). Dengan menganalisis kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, kompetensi daerah dapat dievaluasi. Keluaran/hasil kegiatan/program yang berhubungan dengan penggunaan anggaran daerah akan atau telah tercapai dalam kuantitas dan kualitas yang terukur.

### *Stewardship Theory*

(Donaldson, 1991) *Stewardship theory* ialah penatalayanan, manajer harus memprioritaskan tujuan perusahaan di atas kepentingan pribadi. Adanya hubungan antara tingkat kesenangan dan keberhasilan organisasi juga dapat dijelaskan dengan teori stewardship. Dengan memaksimalkan prinsip utilitas dan manajemen, kesuksesan di tingkat organisasi dapat dicapai. Jika tidak, teori penatalayanan dapat diterapkan dengan memaksimalkan pengelolaan dan utilitas para pelaku di tingkat organisasi. Instansi pemerintah dan organisasi nirlaba lainnya, misalnya, dapat menggunakan teori stewardship dalam studi akuntansi organisasi.

Dalam hal ini WBK WBBM dan administrasi yang prima menjadi tujuan tetap Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan. Kantor Imigrasi harus memberikan penjelasan yang jelas dan mendalam mengenai data akuntansi dan informasi terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan ini dapat digunakan oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memandu pengambilan keputusan mengenai kebijakan ekonomi. Organisasi di sektor akuntansi pada dasarnya melayani kepentingan publik dengan memberikan aktor dan pelayan akses terhadap informasi. Akuntansi memainkan peran penting dalam memastikan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan sumber daya pemerintah secara bijaksana. Penggunaan standar akuntansi sebagai landasan untuk menunjukkan pengendalian aktivitas atas pengelolaan sumber daya.

Karena adanya kendala, pemilik sumber daya menyerahkan administrasi dan kendali kepada individu atau organisasi yang lebih mampu menangani sumber daya yang mereka miliki. Perjanjian tertulis antara didasarkan pada kepercayaan dan akuntabilitas untuk mencapai tujuan organisasi. Paradigma yang mungkin diterapkan dalam bisnis sektor publik adalah teori *stewardship*.

Penelitian mengenai teori *stewardship* memiliki konsekuensi signifikan yang dapat digunakan untuk membenarkan peran pemerintah sebagai lembaga yang dapat diandalkan, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan menawarkan layanan yang adil dan bertanggung jawab kepada masyarakat dengan menggunakan dana yang telah dipercayakan untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial dan ekonomi sebaik-baiknya.

### **Value For Money**

*Value for money* yang diartikan sebagai penghormatan terhadap nilai uang merupakan gagasan utama dalam organisasi sektor publik (Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, 2013). *Value for money* sebagaimana merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga faktor (Mardiasmo, 2009).

Tujuan utamanya adalah menjadi ekonomis, efektif, dan efisien. Tindakan harus ekonomis (hemat) dalam pemilihan dan penggunaan sumber daya, efisien (efektif) dalam hal penggunaan atau pengorbanan dikurangi dan keuntungan dimaksimalkan, dan efektif (efektif) dalam hal mencapai tujuan guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan nilai uang, maka tujuannya terpenuhi.

Nilai untuk uang (*Value For Money*) adalah gagasan manajemen yang memandu pilihan yang diambil oleh perusahaan sektor publik, klaim Mardiasmo. Ketiga unsur ini ekonomis, efektif, dan efisien. Perekonomian adalah memperoleh masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga serendah mungkin. membandingkan input dengan nilai input yang telah dinyatakan dalam uang. Efisiensi adalah kemampuan untuk menghasilkan output sebanyak-banyaknya dengan menggunakan input yang sedikit. Efisiensi didefinisikan sebagai rasio keluaran terhadap masukan dalam kaitannya dengan standar atau sasaran kinerja yang ditetapkan. Sejauh mana hasil program dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan disebut efektivitas. Efektivitas suatu hal dapat diketahui dengan membandingkan hasil dan keluarannya.

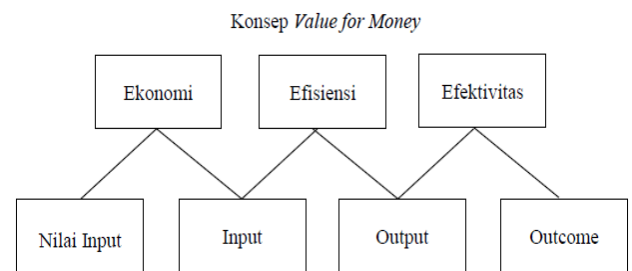
Penerapan *value for money* mempunyai keuntungan sebagai berikut bagi pemerintah (Mardiasmo, 2009):

- a. Memajukan efisiensi pelayanan public.
- b. Memajukan standar pelayanan pemerintah.
- c. Mengurangi biaya pelayanan publik dengan menghilangkan pemborosan serta

melakukan penghematan biaya input yang besar.

- d. Mengalokasikan belanja kepentingan publik secara lebih sempit.
- e. Memajukan pemahaman masyarakat tentang bagaimana uang digunakan untuk membangun akuntabilitas publik.

*Value for Money* secara umum efektif dalam membantu masyarakat mencapai tujuan dan sasaran mereka, dapat digunakan secara efektif untuk menggunakan sumber daya sementara, dan terjangkau dalam memilih dan mengalokasikan sumber daya. Manajemen organisasi sektoral didasarkan pada tiga gagasan mendasar: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2009). Berikut adalah beberapa cara untuk mendefinisikan *value for money* :



Sumber: Mardiasmo 2004

### **Langkah-langkah Pengukuran *Value For Money***

Langkah-langkah menentukan *value for money* menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut:

1. Tindakan Keuangan  
Metrik ekonomi hanya memperhitungkan masukan.
2. Evaluasi Efisiensi  
Rasio output terhadap input berfungsi sebagai ukuran efisiensi. Semakin besar output dibandingkan dengan input, semakin efisien organisasi tersebut.
3. Pengukuran Efektivitas  
Efektivitas adalah ukuran seberapa baik atau buruknya suatu organisasi mencapai tujuannya.
4. Evaluasi Hasil

Dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat adalah hasilnya.

### **Pengukuran Kinerja berdasarkan Konsep *Value For Money***

Nilai uang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan dalam bisnis, pemerintahan, dan sektor publik. Masukan, keluaran, dan hasil harus diperhitungkan ketika mengevaluasi seberapa baik kinerja suatu pemerintah. Karena keluaran sering menimbulkan masalah, pengukuran menjadi sulit. Hal ini tidak selalu merupakan hasil fisik bagi pemerintah karena sebagian besar dampak yang ditimbulkannya juga tidak berwujud.

Metrik kinerja dan indikator kinerja pada dasarnya berbeda satu sama lain. Apakah pengukuran kinerja, seperti laporan keuangan pemerintah, biasanya terkait dengan evaluasi kinerja langsung, merupakan perbedaan utama antara ukuran kinerja dan indikator kinerja. Di sisi lain, indikator kinerja adalah objek yang ditemukan di alam yang digunakan untuk analisis kinerja tidak langsung.

### **Pengukuran Ekonomi**

Perekonomian dibangun berdasarkan konversi input primer seperti uang menjadi input sekunder seperti tenaga kerja, pasokan, infrastruktur, dan barang modal yang dibutuhkan oleh bisnis. operasi (Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, 2013). Konsep biaya unit input dan ilmu ekonomi berjalan seiring. Menurut teori ekonomi, sumber daya input harus diperoleh dengan biaya yang lebih sedikit, atau dengan harga yang mendekati harga pasar. Untuk menghitung perbandingan antara input dengan nilai penerimaan input dalam rupiah, digunakan rumus metodologi dalam ilmu ekonomi. Tingkat keekonomian dapat dinilai dengan membandingkan pengeluaran yang direncanakan dan realisasinya dengan persentase tingkat pencapaiannya.

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{input}}{\text{input value}} \times 100\%$$

### **Pengukuran Efisiensi**

Efisiensi menurut (Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, 2013) berkaitan dengan bagaimana sumber daya dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu keluaran dibandingkan dengan keluaran itu sendiri. Rasio output terhadap input, sering dikenal sebagai output per unit input, adalah definisi efisiensi yang sistematis. Tingkat efisiensi

dapat diketahui dengan membandingkan selisih anggaran pendapatan saat ini dengan anggaran belanja saat ini. Jika suatu organisasi, program, atau kegiatan dapat menghasilkan hasil tertentu dengan masukan yang sesedikit mungkin, atau dapat menghasilkan keluaran yang maksimal dengan sejumlah masukan tertentu (dalam anggaran), maka dianggap efisien.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

### **Pengukuran Efektivitas**

Dengan harapan tercapainya hasil yang sebenarnya, (Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, 2013) menyatakan bahwa efektivitas terikat pada hubungan antar hasil. Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dan hasil. Efektivitas organisasi, program, atau kegiatan meningkat seiring dengan kontribusi keluaran terhadap pencapaian tujuan. Jika efisiensi dan ekonomi lebih menekankan pada input, maka efektivitas lebih menekankan pada hasil. Jika hasilnya memungkinkan organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan (dengan memanfaatkan pengelolaan keuangan yang bijaksana), maka organisasi tersebut dianggap berhasil. Dengan mengukur selisih pendapatan aktual dan anggaran, serta persentase tingkat pencapaiannya, maka dapat diketahui tingkat efektivitasnya.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

### **Anggaran Sektor Publik**

Anggaran, sebagaimana didefinisikan oleh (Mahsun, 2013), adalah strategi keuangan untuk masa depan yang biasanya berlangsung selama satu tahun dan dinyatakan dalam istilah moneter. (Mahmudi, 2018) menyatakan bahwa anggaran sektor publik yang merupakan komponen APBN dan APBD menetapkan rencana keuangan masa depan baik pemasukan, pengeluaran, untung dan rugi, pembiayaan, juga kegiatan yang akan dilakukan.

### **Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah memuat rincian realisasi dan anggaran suatu lembaga pelapor untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. LRA membandingkan anggaran dengan realisasinya

dalam satu periode pelaporan dan memberikan ringkasan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah. Laporan realisasi anggaran menurut (Siregar, 2015) merupakan dokumen yang merangkum sumber, alokasi, dan pemanfaatan sumber daya keuangan yang dikuasai pemerintah untuk jangka waktu tertentu.

### Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang “Pengukuran Kinerja dengan Prinsip Value For Money Pemerintah Kota Batu” dari (Andriani, Sri 2012). Persentase tersebut berada di bawah 100% pada tahun 2005 hingga 2009, yang menunjukkan buruknya kinerja perekonomian Pemerintah Kota dalam merealisasikan belanja negara. Karena kesadaran bahwa pengeluaran lebih tinggi daripada penciptaan pendapatan, maka rasio efisiensi kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu keseluruhan sangat efisien. Kinerja pemerintah ditunjukkan melalui rasio efektivitas pada tahun 2005 hingga 2009. Wilayah Kota Batu seringkali efektif bila nilai rasionya lebih besar dari 100%. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Pemerintah Daerah Kota Batu bernilai baik karena memiliki kriteria efektivitas dan efisiensi perekonomian.

Berbeda dengan penelitian “Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value For Money” yang dilakukan Imanuel, dkk. (2020). Kinerja keuangan Pemprov Sulut pada tahun 2015 hingga tahun 2017 tergolong efisien, sesuai kesimpulan penelitian menilai kinerjanya berdasarkan *value for money* sehingga tercipta rasio di atas 100. Rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja keuangan termasuk dalam kategori efisiensi karena perhitungan rasio tersebut memberikan hasil antara 90% hingga 99%. Rasio efektivitas menampilkan kinerja keuangan yang sukses secara finansial. Rasio yang dihitung berkisar antara 85% hingga 99%.

## METODE PENELITIAN

### Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan.

### Jenis dan Sumber Data

Satu-satunya sumber data sekunder yang digunakan dalam analisis ini adalah catatan keuangan yang dapat diakses publik. Pencatatan keuangan Kantor

Imigrasi Tanjung Balai Asahan menyimpan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019-2020 yang digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini.

### Metode Pengumpulan Data

Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan adalah dokumen yang dipakai. Metode dokumentasi peneliti adalah pengumpulan data keuangan. Mempelajari sumber-sumber yang membahas nilai uang adalah komponen teknik tinjauan pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan data.

### Metode Analisis Data

Metode analisis kuantitatif dipakai untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Menurut (Sugiyono, 2011) penelitian kuantitatif merupakan penelitian berupa angka-angka dan analisis-analisis menggunakan statistik. Menurut (Amiruddin, 2010) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data dan menggunakan daftar pertanyaan berstruktur (angket) yang disusun berdasarkan pengukuran terhadap variabel yang diteliti yang kemudian menghasilkan data kuantitatif. (Tanzeh, 2006) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menitik beratkan pada penyajian data yang berbentuk angka atau kualitatif yang diangkakan (skoring) yang menggunakan statistik

### Definisi Operasional Variabel

*Value for money* berfungsi sebagai variable independent penelitian ini. *Value for money* adalah gagasan yang mendasar seberapa baik organisasi sektor public beroperasi pada tiga factor: ekonomi. Efisien, dan efektivitas (Agustin, 2017). Variabel adalah ciri-ciri, atau nilai-nilai yang diputuskan untuk diteliti guna membentuk kesimpulan (Sugiyono, 2017). Mereka dapat diamati pada individu, benda, atau aktivitas. Untuk menjamin jenis, ukuran, dan skala variabel yang digunakan dalam penelitian, diperlukan operasionalisasi variabel. Evaluasi *value for money* didasarkan pada pilar penilaian ekonomi, efisien, dan efektif.

Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Pengertian	Indikator
1	Ekonomis	Menurut teori ekonomi, mengacu pada	sumber daya yang digunakan

	penerimaan masukan baik kuantitas maupun kualitas dengan biaya serendah mungkin. Seberapa besar organisasi sektor publik dapat mengurangi sumber dayanya juga bergantung pada perekonomian (Mardiasmo, 2009).	untuk melaksanakan suatu kebijakan, program, atau kegiatan sebagai masukan (input). Pendapatan yang direalisasi adalah selisih antara masukan dan nilai masukan.
2	Efisiensi	Efisiensi menyatakan bahwa nilai uang diwakili oleh output tertinggi untuk serangkaian input tertentu atau input terendah untuk serangkaian output tertentu.
		Keluaran (output) mengacu pada hasil suatu program, kegiatan, atau serangkaian kebijakan yang efektif. Input adalah realisasi pendapatan, sedangkan output adalah realisasi biaya.
3	Efektivitas	Efektivitas dapat didefinisikan sebagai perbandingan produksi dan hasil (Mardiasmo, 2009).
		Output (hasil yang diperoleh). Outputnya adalah anggaran pendapatan, sedangkan outcome adalah aktualisasi pendapatan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Rasio Ekonomi

Rasio ekonomi semata-mata digunakan untuk memperhitungkan masukan. Tenaga dari sumbernya dimanfaatkan untuk menjalankan kebijakan, program, dan kegiatan. Jika membandingkan nilai realisasi input dengan biaya lebih rendah dengan jumlah yang diproyeksikan, maka kinerja Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan dinilai lebih hemat biaya.

Tabel 2. Pengukuran Rasio Ekonomi

No	Jenis Belanja	2019	2020
		Ekonomis (%)	Ekonomis (%)
1	Pegawai	99,5	99,4
2	Barang	98,1	79,9
3	Modal	98,9	97,6
	Jumlah	98,8	91,0

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan Tabel 2 yang menghitung rasio ekonomi di kantor tahun 2019-2020, jenis pengeluaran di Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan termasuk dalam kategori ekonomi. Hal ini disebabkan realisasi belanja negara tahun 2019 hanya sebesar Rp 7,633,619,376 (atau 98,8% dari anggaran sebesar Rp 7,723,922,000), sedangkan realisasi belanja negara tahun 2020 sebesar Rp 9,891,807,485 (atau hanya 91,0% dari anggaran sebesar Rp 10,862,778,000).

Tabel 2 lebih lanjut menjelaskan kategori belanja produk memiliki anggaran tahun 2020 sebesar 4,393,692,000 dan tingkat tabungan sebesar 879,684,068, sehingga belanja tersebut dapat dikategorikan sebagai belanja ekonomi.

### Rasio Efisiensi

Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan disebut efisien apabila output yang dihasilkan melebihi input, hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan pengetahuan dapat menghasilkan produksi yang lebih tinggi.

Tabel 3. Pengukuran Rasio Efisiensi

No	Jenis Belanja	2019	2020
		Efisiensi (%)	Efisiensi (%)
1	Pegawai	99,5	99,4
2	Barang	98,1	79,9
3	Modal	98,9	97,6
	Jumlah	98,8	91,0

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan informasi pada Tabel 3 yang menghitung rasio efisiensi, jenis pembelanjaan tergolong efisien. Tahun 2019 sebesar 98,8%, dan tahun 2020 sebesar 91,0%.

Berdasarkan Tabel 3, tahun yang paling efisien untuk belanja produk adalah tahun 2020, dan tahun yang paling tidak efisien untuk belanja pegawai adalah tahun 2019.

## 2. Rasio Efektivitas

Sejauh mana suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya dapat digunakan untuk mengukur efektivitasnya. Jika produksi melebihi outcome maka efektif, artinya pencapaiannya bisa melebihi tujuannya.

Tabel 4. Pengukuran Rasio Efektivitas

No	Jenis Belanja	2019	2020
		Efektivitas (%)	Efektivitas (%)
1	Pegawai	100	100
2	Barang	100	100
3	Modal	100	100
	Jumlah	100	100

Sumber: Data Olahan

Dari Tabel 4 yang menghitung rasio efektivitas di Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan tahun 2019–2020, terlihat bahwa seluruh pengeluaran dapat dikatakan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pengeluaran semacam itu berhasil mencapai tujuan yang diharapkan.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari temuan dan pembahasan seputar evaluasi kinerja di Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan tahun 2019–2020 dapat diketahui:

- Kanim Tanjung Balai Asahan (2019-2020) dikabarkan hemat karena menghemat 98,8% di tahun 2019 dan 91,0% di tahun 2020.
- Karena Kanim Tanjung Balai Asahan (2019-2020) mampu memaksimalkan output, maka efisiensi pada nilai 98,8% pada di 2019 dan 91,0% di tahun 2020.
- Kanim Tanjung Balai Asahan dinilai efektif pada tahun anggaran 2019–2020 karena berhasil menghasilkan nilai 100% di tahun 2019, juga 100% di tahun 2020.

### Saran

Untuk mencegah terjadinya perbandingan luas antara realisasi dan anggaran pada tahun berikutnya, maka dimaksudkan agar Kantor Imigrasi Balai Asahan menerapkan survei harga pasar sebelum membuat anggaran perencanaan belanja barang.

Agar rasionya tetap sama atau bahkan meningkat, Kepala Tanjung Balai Asahan disarankan untuk dapat mempertahankan kinerja atau kapasitasnya dalam mencapai anggaran dan harus terus melakukan penilaian terhadap pemilihan target selanjutnya atau yang akan datang. Hal ini berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan yang meliputi pengukuran rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas serta didasarkan pada gagasan *value for money*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, R. D. (2017). Konsep Value For Money Dalam Mengukur Kinerja Pelayanan Sektor Publik. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol (6) No 6, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Amiruddin. (2010). *Statistik Pendidikan*. Yogyakarta: Teras.
- Donaldson, L. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*.
- Fahmi, I. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.

- Khikmah, A. (2014). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Konsep Value For Money. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahmudi. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahsun. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sadeli, L. M. (2015). *Accounting theory*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tanzeh, S. (2006). *Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat (LKAF).